

**PEMBERIAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) BAGI
NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA
KELAS IIA SUNGGUMINASA)**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih
gelar Sarjana Hukum jurusan ilmu hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

MUH. TAKBIR

NIM: 100500113076

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

MOTTO

Success will not come to you, but you are the one who has to pick him up

Sukses tidak akan mendatangimu

Tetapi kamulah yang harus menjemputnya

Patience is the best medicine in all success

Kesabaran adalah obat terbaik dalam segala kesuksesan



Aku hanya menghendaki perbaikan semampuku. Tiada keberhasilanku,
kecuali dengan pertolongan Allah. KepadaNya aku berserah diri, dan
kepadaNya pula aku akan kembali.”

(Q.S.Hud:88)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang beranda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Takbir
Nim : 10500113076
Tempat/Tanggal lahir : Makassar 28 Februari 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum/ S1
Alamat : Desa Julu Pa'mai Kec. Pallangga Kab. Gowa
Judul : Pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana
narkotika (studi kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA
Sungguminasa).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

M A K A S S A R

Gowa, 10 Juli 2017

Penyusun



MUH. TAKBIR

NIM : 10500113076

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PEMBERIAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA)”, yang disusun oleh Muh. Takbir, Nim: 10500113076, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2017 M, bertepatan dengan bulan Ramadhan 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, (dengan beberapa perbaikan).

Gowa 10 Juli 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H. (.....)
Munaqisy I	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum. (.....)
Munaqisy II	: Dr. Fadli A. Natsif, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing II	: Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H. (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur bagi Allah S.W.T penguasa langit dan bumi yang senantiasa melimpahkan Rahmat, dan Hidayah-Nya serta karunia, kekuatan dan ketabahan yang selalu memotifasi untuk selalu berusaha menyelesaikan studi starata 1 (satu). Semoga diakhiri masa kemahasiswaan, dengan tetap berada di bawah naungan cahaya ilahi-Nya, ilmu-Nya, Rahman dan Rahim-Nya karena hanya dengan kehendak dan izinnyalah sehingga mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yaitu skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah S.A.W sebagai suri teladan yang dengan perjuangannya membimbing kita dalam kebahagiaan, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya. Semoga aku senantiasa mendapatkan cipratan berkah dari perjuangan mereka untuk tetap konsisten terhadap tuntutan hidup yang benar hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tua saya Ayahanda **Sainuddin Dg Mangung** dan Ibunda tercinta **Normawati Dg Tommi** sebagai wujud rasa cinta dan terimakasih yang tak terhingga atas Do'a, kasih sayang, perjuangan dan pengorbanannya yang telah membesarkan, mendidik dan membina ananda hingga

ananda mampu menjalani setiap ujian hidup yang ananda jalani, Insya Allah, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah S.W.T.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Dr. Jumadi, S.H.,M.H.** Sebagai pembimbing I dan Bapak **Ashabul Kahfi, S.Ag.,M.H.** Sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan, saran, inspirasi dan kritik yang dengan penuh kearifan membimbing saya. Smoga Allah S.W.T melimpahkan anugrah dan hidayahnya kepada beliau. Serta ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si dan para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya yang telah membantu dan menyediakan berbagai fasilitas selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah, S.H.,M.H. Selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan bagi penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Bapak Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya yang telah membantu selama perkuliahan dan selalu memberikan motivasi, keteguhan hati selama menempuh pendidikan dan masukan-masukan selama menyusun skripsi penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta staf, karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Bapak Victor Teguh Prihartono,Bc.IP,S.Sos,MH. Sebagai kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin untuk meneliti serta informasi dan data yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Saudara kandung penulis kakak Hasmirawati, S.Farm yang selalu menghibur canda dan tawa, memberikan motivasi, keteguhan hati dan nasehat-nasehat.
8. Saudara-saudara seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Febri Ramadhani, Saddam, Ahmad Afandi, Ahmad Rais, Firman, Wahyu Restu Pratama, Hasan, Ahmad Arif, Rahmat Rofi, Muhammad Satria, Andi Khaerul Fahmi, Supriadi Bhot, Muhammad Rijal Tamrin, dan sahabat-sahabat lain yang belum sempat penulis sebutkan namanya, yang selama ini bersama-sama belajar dan rela mengorbankan waktunya demi mempererat jalinan silaturahmi dan persaudaraan antar sesama mahasiswa.

9. Senior-senior di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang selama ini selalu membimbing dan memberikan arahan-arahan, motivasi, dan selalu berbagi ilmunya.
10. Teman-teman diorganisasi ILS (Independent Law Studen), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), POSPERA (Posko Perjuangan Rakyat), Hipma Gowa Kordinatora Pallangga, yang selama ini penulis banyak belajar dan saling bertukaran pikiran bersama kakanda-kakanda, adik-adik dan kawan-kawan dalam dunia oraganisasi.
11. Segenap teman-teman PPL di Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Ari Wahyudi Ahmad, Nur Alam Resky, Fadli, Muh Nur Khutbanullah Lissalam, Ahmad Rais, Anas Ibrahim, Aulia, Hanisa ayu solichin, vira. Yang selama PPL selalu bersama-sama dan kompak dalam pekerjaan.
12. Segenap teman-teman KKN Angkatan 53 Sekecamatan Tompobulu Kabupaten gowa, khususnya Posko Kelurahan Malakaji: Febri Ramadhani, Rifal, Ali Akbar, Saleha, Nayu, Ayu, Chana, Imma, Irma, dan Tuan rumah Bapak Sarifuddin, S.E. selaku Lurah Malakaji, Beserta keluarga besarnya yang penuh dengan kebaikan hati dan keramahan menerima dan membantu kami saat KKN tinggal berposko selama 2 (dua) bulan di rumah beliau.

Semoga Allah S.W.T senang tiasa merahmati kita semua, dengan keterbatasan waktu dan kemampuan yang ada, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf kepada semua pihak atas keterbatasan penulis. Semoga apa yang

penulis sajikan dapat memberikan mamfaat bagi pembaca, Amin. Terakhir, Penulis ingin mengutip perkataan Nabi Syuaib A.S.

“Aku hanya menghendaki perbaikan semampuku. Tiada keberhasilanku, kecuali dengan pertolongan Allah. KepadaNya aku berserah diri, dan kepadaNya pula aku akan kembali.”
(Q.S.Hud:88)

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 10 Juli 2017

Penulis



MUH. TAKBIR

NIM : 10500113076



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xxi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Umum Pidana dan Pemidanaan.....	12
1. Hukum Pidana dan Pemidanaan.....	12

2. Narapidana.....	17
3. Tujuan Hukum Pidana dan pembedaan.....	17
B. Hukum Narkotika Dalam Pandangan Islam.....	23
C. Remisi Sebagai Hak Asasi Manusia Narapidana.....	25
D. Remisi Dalam Sistem Pemasyarakatan.....	28
1. Sejarah Singkat pemasyarakatan.....	28
2. Tujuan, Fungsi, Dan Asas Sistem Pemasyarakatan.....	33
E. Pemberian Remisi.....	34
1. Pengurangan Masa Pidana (Remisi).....	35
2. Dasar Hukum Pengurangan Masa Pidana (Remisi).....	36
3. Jenis dan Tata Cara Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi).....	40

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	50
B. Metode Penelitian.....	50
C. Sumber Data.....	52
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Instrumen Penelitian.....	53
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	53

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
---	----

B. Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa.....	59
C. Hal-hal Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa.....	79
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
RIWAYAT HIDUP.....	90
MOTTO.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Pertama.....	67
Tabel 2. Jumlah Narapidana yang mendapatkan Remisi Khususnya Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa pada Tahun 2014.....	69
Tabel 3. Jumlah Narapidana yang mendapatkan Remisi Khususnya Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa pada Tahun 2015.....	70
Tabel 4. Jumlah Narapidana yang mendapatkan Remisi Khususnya Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa pada Tahun 2016.....	71



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	Fathah dan alif atau yaa'	A	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	I	i dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	U	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ الرَّوَّضَةُ : *raudah al- atfal*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al- Jalaalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *diinullah* بِاللهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

Swt.	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Muh. Takbir
Nim : 10500113076
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkotika telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah di dapatkan, maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan. Pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada, seperti hal pertimbangan indikator berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Sesuai yang terkandung dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1,2 dan 3 peraturan tersebut. Hal ini lebih ditekankan bagi narapidana narkotika yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2).

Adapun saran yang dapat di rekomendasikan yakni: a) Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatkannya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana itu sendiri melainkan terhadap berkurangnya tindak pidana narkotika dan tindak pidana tertentu lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak yang diberikan. b) Pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkotika sebaiknya lebih diperketak lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, hal ini diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga harus memberikan dampak rasa takut kepada masyarakat umum khususnya generasi muda. Sehingga perkara tindak pidana narkotika di Negara ini dapat berkurang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba ataupun napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya.

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.¹

Narkotika dan Psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalagunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika, maka diperlukan tindakan nyata untuk pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika tersebut. Dengan demikian yang menjadi pokok

¹¹ Juliana Lisa FR – Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan kesehatan dan hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h.iii-iv.

persoalan ialah penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba, yang memerlukan strategi pembangunan hukum nasional berkaitan dengan masalah narkoba.²

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Narkoba digolongkan menjadi beberapa golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. yang termasuk jenis narkoba adalah:⁴

- Tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
- Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku⁵ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997. Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkoba. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV

² Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.8.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁴ Juliana Lisa FR – Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan kesehatan dan hukum*, h.iv.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain:⁶

- Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (*Lycergis syyntetic Diethylamide*) dan sebagainya.

Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sentetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu system syaraf pusat, seperti:

- Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: Lem/perekat, acetone, ether dan sebagainya.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika di Indonesia dan terungkapnya impor precursor atau bahan pembuat narkotika dalam bentuk besar dari luar Negeri ke Indonesia.

Peredaran narkoba menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam kehidupan masyarakat terutama pada generasi muda Bangsa. Menyadari sedemikian besarnya dampak yang di timbulkan oleh penyalahgunaan narkotika,

⁶ Juliana Lisa FR – Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan kesehatan dan hukum*, h.iv-v.

pemerintah sendiri telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sistem pemasyarakatan yang ada nampaknya tidak dapat memberikan kontribusi besar dalam hal meminimalisir terjadinya tindak pidana narkoba. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tidak lain merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan. Hal tersebut ternyata tidak begitu sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana narkoba karena narapidana narkoba mendapat perlakuan yang sama dengan narapidana lain dan pengurangan masa pidana atau remisi yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan yang pada saat itu penyalagunaan narkoba belum begitu marak terjadi, tentunya jika dikondisikan pada masa kini, semangat pemasyarakatan itu tidak sejalan lagi dengan tingginya tingkat peredaran narkoba yang terjadi. Tentunya hal ini harus dipertimbangkan oleh para pembuat Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan agar dapat disesuaikan dengan semangat penegakan hukum saat ini. Dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,

yang selanjutnya telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa :

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”

2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan tradisional terorganisasi lainnya, selain harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan;

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar;
 - (1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia.
 - (2) Tidak mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan tersebut, terdapat pengecualian dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap beberapa tindak pidana. Bukan hanya narapidana tindak pidana narkoba yang diberikan hak atas pengurangan masa pidana, akan tetapi juga meliputi narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Walaupun sudah terdapat pengecualian terhadapnya, namun jika disesuaikan dengan masalah yang paling sering terjadi saat ini, sebut saja tindak pidana narkoba, terorisme dan tindak pidana korupsi, tentunya harus dipertimbangkan kembali.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, menarik untuk mengangkat isu pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba pada penyelesaian tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkoba (Studi Kasus Di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa).

B. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan mengenai pemberian pengurangan masa pidana (Remisi) bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba kelas IIA Sungguminasa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa ?

D. Kajian Pustaka

Untuk judul skripsi pemberian pengurangan masa pidana (Remisi) bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba kelas IIA Sungguminasa, dari hasil penelusuran yang ditemukan ada beberapa literature yang berkaitan dengan judul skripsi ini diantaranya : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

Pertama, buku yang berjudul *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. yang tulis oleh Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W. didalam buku ini tersebut menjelaskan tentang permasalahan narkoba dari kajian kesehatan dan hukum. Selain itu buku ini juga dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba serta penjelasannya dan PP Nomor 25 tahun 2011 Tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba.⁷

⁷Juliana Lisa FR – Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan kesehatan dan hukum*, h.iii.

Kedua, buku yang berjudul *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, yang ditulis oleh Rocky Marbun, didalam buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana pemberian pengurangan remisi terhadap keputusan presiden republik Indonesia nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi.⁸ dan juga menjelaskan peraturan pemerintahan republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.⁹ Sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Ketiga, buku yang berjudul "*Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*", yang di tulis oleh Dwidja Priyanto, Di dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana prosedur dan bentuk-bentuk pemberian remisi , jenis-jenis bentuk remisi dan menjelaskan berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (lihat pasal 1 angka 6). Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 keputusan presiden republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, disana hanya dikatakan "setiap narapidana dan Anak Pidana yang menjalani

⁸Dwidja Priyatno,., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,(Bandung: Refika Aditama,2006), h.259.

⁹Dwidja Priyatno,., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, h.228.

pidana penjara sementara pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Keempat, buku panduan “*Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yang berjudul Himpunan Peraturan Narkotika Dan Peraturan Lainnya*”, disusun oleh: Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum Dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. Didalam buku tersebut menjelaskan semua peraturan perundang-undangan tentang narkotika.

Kelima, buku yang berjudul “*Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*”, yang ditulis oleh Siswantoro Sunarso, Didalam buku tersebut, merupakan hasil penelitian tentang masalah penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis, masyarakat, dan para penegak hukum dapat mengetahui efektifitas pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi pelaku tindak pidana narkoba, dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang semakin marak di Indonesia sehingga tidak menimbulkan adanya asumsi-asumsi yang tidak berdasar mengenai pemberian remisi terhadap narapidana narkoba.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Hukum Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹

Seorang ahli hukum memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Moeljatno, menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan hukum. Dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut.²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjokoro, menyatakan bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht*

¹Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.6.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993), h.1.

dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.

Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.³

Selanjutnya Soedarto, menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:⁴

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Sedangkan definisi hukum pidana menurut Van Bammelen membagi ke dalam pidana materiil dan pidana formil. Selanjutnya Van Bammelen menjelaskan bahwa hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menuntukan tata tertib yang

³ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra wacana media, 2014), h. 191.

⁴ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 191-192.

harus diperhatikan pada kesempatan itu. Dan pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materil.

Terlepas dari pembagian tersebut, menurut penulis, bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.⁵

Menurut Chairul Chuda, Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Selanjutnya menurut Chairul Chuda bahwa dilihat istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat orang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.

Menurut Van Hamel, Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Arti dari pidana itu atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

⁵ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, h.192.

Menurut Simons, Pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁶

Begitu pula dengan Algranjanssen, mengatakan bahwa Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harkat kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.⁷

Dari semua rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” penghukuman.

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁸

“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang di sebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur

⁶ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, h.193.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1997),h.47.

⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), h.20.

bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertip yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Lanjut Tirtamidjaja menjelaskan tentang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:⁹

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. Pidana dijatuhkan bukan hanya semata karna pelaku telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut, terlihat bahwa pembedaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya pemberian sanksi melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, h.20.

2. Narapidana

Kamus bahasa Indonesia memberikan arti bahwa narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.¹⁰

Sementara menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani hukuman; orang bauaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaan hilang.

3. Tujuan Hukum Pidana dan pembedaan

Pidana berasal dari kata *straf* dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata,

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 774.

¹¹M.Y. Dahlan, Al-Barry et.al, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003), h. 537.

administrasi, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana.

Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparaturnya hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans, bahwa sanksi itu diancamkan terhadap seorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat Undang-Undang membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat Undang-Undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut.¹²

Pada zaman Yunani dahulu oleh Plato mengemukakan bahwa “tujuan pembedaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-menakuti dan memperbaiki orang serta tercapainya keamanan”. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah “menakut-nakuti serta memperbaiki orang”. Pada abad pertengahan Thomas Aquino, sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat bahwa tujuan pidana ialah “bukanlah pembalasan semata-mata tapi disesuaikan dengan tujuan Negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakuti”.¹³

¹²Hans Kelsen, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), h. 78.

¹³Rusli Effendy, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Makassar: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), 1986), h. 108.

Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak jaman Protagoras, orang yang selalu mencari dan memperdalam tujuan pemidanaan. Di dalam Protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula Seneca, Seorang filosof romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi, yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremy bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Dilain pihak Immanuel Kant dan Gereja katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.¹⁴

Tujuan hukum pidana *strafrechtscholen* mengenal dua aliran untuk maksud dan tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana yaitu aliran klasik dan aliran modern:¹⁵

Menurut aliran klasik *de klassieke school/de klassieke richting* tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Peletak dasarnya adalah Markies Van Beccaria yang menulis tentang “*Die delitte edelle pene*”, Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang, yang harus tertulis, maka karangan itu sangat

¹⁴Dwidja Priyanto, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 22-23.

¹⁵Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992), h. 24-25.

berpengaruh sehingga timbullah aliran masyarakat yang menuntut agar hukum pidana itu diadakan dengan tertulis.

Sebaliknya menurut aliran modern *de modern school/de richting* mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.

Dari uraian tersebut tampak, bahwa pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*teological theories*). Di samping itu timbul pula pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*teological retributivist*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang prural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermamfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan teological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.¹⁶

¹⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, h.23.

Berkaitan dengan tujuan pidana tersebut, maka muncullah teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:¹⁷

- a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributif / vergelding theorieen*).
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorieen*).

Teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan mamfaat untuk menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata.¹⁸

Teori Absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan (*quia peccatum est*). Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Menjatuhkan

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, h.23.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984),h.10.

pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹⁹

Teori Relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *Reducers* (penganut teori reduktif).²⁰

Berdasarkan pernyataan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat mebinasakan.

Tujuan pembedaan memperbaiki si penjahat, agar menjadi manusia yang baik, menjatuhkan pidana harus disertai dengan pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, h.24 .

²⁰ Dwidja Priyanto, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, h.25.

menjalani pembedaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta perbaikan yuridis.

B. Hukum Narkotika Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, hukum narkotika dalam Al-Qur'an tidak ada ketentuan hukumnya, akan tetapi dengan analogi hukum, atau qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya (*nash/dalil*) dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya persamaan. Sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sama bahkan lebih dasyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat Al-Qur'an yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika.²¹ Berikut ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan minuman keras atau khamar :

Q.S. Al-Baqarah/2:219²²

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahan:

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

²¹ Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 273

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bogor: 2007), h. 34

dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (Q.S. Al-Baqarah/2:219)

Q.S. Al-Maidah ayat/5:90:²³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Dari ayat diatas menyatakan bahwa larangan untuk meminum khamar, Karena meminum khamar termasuk perbuatan keji. Begitu pula dalam hadits nabi riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi bersabda:²⁴

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya :

“Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram.” (HR. Muslim)

Pada hadits ini nabi menyamakan kedudukan hukum setiap minuman keras sebagai haram, tidak terbatas pada yang terbuat dari anggur, kurma, tin, madu dan lain-lainnya. Begitu pula narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan maka akan memberi pengaruh negative yang amat besar bagi jasmani maupun rohani pemakainya. Dari Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa zat narkoba yang

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.123.

²⁴ Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba*, h.199.

apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan kemabukan dan dapat dikategorikan sebagai haram.

C. Remisi Sebagai Hak Asasi Manusia Narapidana

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Senada dengan pengertian di atas adalah pernyataan awal Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang di terbitkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.²⁵

Hak Asasi Manusia ini tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut, undang-undang ini, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan

²⁵ A.Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012).h.148.

setiap orang demi kehormatan dan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁶

Kesadaran manusia terhadap Hak Asasi Manusia bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian Hak Asasi Manusia bukan hal yang baru lagi.²⁷ Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui Hak Asasi Manusia, komitmen terhadap perlindungan atau pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pada tahap pelaksanaan putusan, Hak Asasi Manusia yang diintrodusir menjadi hak narapidana dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi sesama manusia. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial, pelanggaran-pelanggaran di bawah umur harus

²⁶ A.Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, h.148.

²⁷ Naning Ramdlon, *HAM Di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983),h.8.

dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.²⁸

Materi Hak Asasi Manusia narapidana yang terdapat pada pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengenai perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (*Standar minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957*), yang meliputi;²⁹

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolah raga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;

²⁸ Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, (Makassar: Perpustakaan FH-Unair, 1999),h.149.

²⁹ Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1995),h.74.

14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
17. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga;

Dari apa yang tertulis di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia narapidana yang masih sangat mungkin untuk diadopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

D. Remisi Dalam Sistem Pemasyarakatan

1. Sejarah Singkat pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kehilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih dikenal pada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitative, dan edukatif.

Meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena itu, praktik pemasyarakatan yang telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pelaksanaan dan Tim pengamat pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan disetiap Unit Pelaksanaan Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.³⁰

Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu:³¹

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

³⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, h.103-104.

³¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, h.104-105.

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu sistem tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- c. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Pemasyarakatan.
- d. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
- e. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Narapidana adalah Terpidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
- g. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 1. Anak pidana yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 13641

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh meninggalkan filosofis, pembalasan, penjara, dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditunjukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi).

Dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina,

dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

2. Tujuan, Fungsi, Dan Asas Sistem Pemasyarakatan

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 UU No. 12/1995), yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana Pemasyarakatan kepada fitrah dalam hubungan dengan Tuhannya manusia dengan

pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (penjelasan Pasal 2 UU No. 12/1995).

Fungsi Sistem Pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Pasal 3 UU No. 12/1995), yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.³²

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:³³

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjadinya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

³² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, h. 106.

³³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, h. 106.

E. Pemberian Remisi

1. Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Pengurangan masa pidana (remisi) adalah hak yang paling dinantikan oleh setiap narapidana. Remisi merupakan penurunan, pemotongan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Pemberian remisi dimaksudkan untuk menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan dengan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, dan jiwa bermusyawarah untuk mufakat yang positif. Remisi merupakan implementasi pembinaan dan bimbingan berdasarkan Pancasila.³⁴

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus dan hari keagamaan.³⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa pidana menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 1 angka 6).

³⁴ Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010),h.74.

³⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1986),h.503.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Rerpublik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.³⁶

2. Dasar Hukum Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

³⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, h.133-134

- a. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi Syarat :
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemeberian remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

- b. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keagamaan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memnuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar;
 - 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia;
 - 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1)
- (2) Pidana Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang
 - a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Berusia diatas 70 (tuju puluh) tahun; atau
 - c. Menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.”

Kemudian berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah telah mengatur secara limitatif mengenai tata cara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia ini dapat kita temui pada Pasal 6,7,8, dan Pasal 26.

3. Jenis dan Tata Cara Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemenuhan hak pengurangan masa pidana ini, dapat dilihat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, dan remisi dasawarsa.³⁷

- a. Remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus.
- b. Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang

³⁷ Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, h.76-78.

bersangkutan (Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak) dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya satu kali dalam setahun bagi masing-masing agama, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliahkan oleh penganut agama yang bersangkutan.

- c. Remisi tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada pidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau melakukan kegiatan yang membantu lembaga pemasyarakatan.
- d. Remisi dasa warsa adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dalam waktu satu kali 10 tahun HUT RI.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

PASAL 1

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- (2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

PASAL 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

- a. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari yang paling dimuliahkan oleh penganut agama yang bersangkutan.

PASAL 3

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a. Berbuat jasa kepada Negara;
 - b. Melakukan perbuatan yang bermamfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau
 - c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga Pemasyarakatan,
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermamfaat bagi Negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

PASAL 4

- (1) Besarnya remisi umum adalah:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi untuk dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. Pada keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

PASAL 5

(1) Besarnya remisi khusus adalah:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

PASAL 6

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermamfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

PASAL 7

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan

sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

PASAL 8

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitung remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

PASAL 9

- (1) Narapidananayan dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan

baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.

- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden.
- (3) Permohonan perubahan penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada:

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikarenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 13

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui kepala kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Nrapaidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasinkannya dengan Menteri Agama.

Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dicatat didalam daftar tersendiri.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dinyatakan tidak berlaku.

Dasar Hukum Remisi dasawarsa:³⁸

Remisi Dasawarsa adalah remisi yang diberikan satu kali pada setiap 10 tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi dasawarsa pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI. Pada 2005, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian menerbitkan Keputusan No. M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan 60 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Besarnya Remiisi Dasawarsa:³⁹

$\frac{1}{12}$ dari masa pidananya atau maksimum 3 bulan. Diberikan kepada nara pidana yang dipidana lebih dari 6 bulan, Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijatuhi

³⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f66ff3bd89c5/soal-remisi-dasawarsa>,
Tanggal 20 Agustus 2015

³⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f66ff3bd89c5/soal-remisi-dasawarsa>,
Tanggal 20 Agustus 2015

hukuman mati/seumur hidup, dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak pernah melarikan diri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Terkait dengan judul tersebut, sudah pernah ada yang mengkaji atas nama Mudar Azizmannuruki dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap pembinaan narapidana narkotika melalui pemberian pengurangan masa pidana/remisi (Studi Kasus Dirumah Tahanan Negara Kelas IIA Makassar), akan tetapi yang ada di dalam pembahasan judul tersebut, lebih kepada proses pembinaan terhadap narapidana narkotika melalui remisi. Sedangkan perbedaan yang dibahas didalam judul skripsi ini lebih kepada pelaksanaan pemenuhan hak dan pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi).

B. Fokus Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, maka harus di dasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal demikian, maka penyusun

memerlukan kegiatan penelitian dengan mendasarkan kepada penelitian di lapangan (*field research*).

Suatu penelitian memerlukan metodo-metode tertentu. Metode yang diterapkan ini tentunya harus disesuaikan juga ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Peneliti harus berdasarkan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah tertentu.

Menurut, **Soerjono Soekanto** yang menyatakan bahwa metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengingatkan dengan cara yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.²

Berkaitan dalam hal tersebut, data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa berupa dokumen-dokumen tertulis atau data pemeberian remisi kepada narapidana narkotika yang pernah menjalani pidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres,1984),h.47

²Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2004), h.3

C. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta, data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data, kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi.

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa berupa dokumen-dokumen tertulis atau data pemeberian remisi kepada narapidana narkotika yang pernah menjalani pidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat petugas dan narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa terkait pelaksanaan pemenuhan hak dan pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi). Sedangkan Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis.

E. Instrument Penelitian

Adapun yang menjadi instrument atau alat yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum, sebagai berikut:

1. Buku catatan untuk mendokumentasikan hasil analisis data primer dan sekunder yang telah ditulis sebelumnya diatas kertas;
2. Perangkat lunak penyimpanan bahan hukum, seperti lektop atau komputer dan flasdisk, untuk menyimpan data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan baik secara manual maupun secara online.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan kata lain, Rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan, Di dalam Rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat narapidana yang sudah ada ketetapan masa hukumannya. Dengan kata lain, Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Meskipun berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rutan dan Lapas didirikan pada setiap Ibukota Kabupaten atau Kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rutan dan Lapas.

Namun pada kenyataannya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan dan Lapas. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas. Sehingga Rutan di fungsikan pula untuk menampung narapidana sebagai halnya Lapas. Hal ini juga mengikat kondisi

banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan Lapas atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebagai Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departemen Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Penghuni Rumah Tahanan Negara tidak hanya berisikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan juga yang statusnya masih tahanan, namun dapat pula diisi oleh Narapidana (napi), maksudnya orang tersebut yang seharusnya pindah

dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, tapi masih ada yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai, itu diakibatkan karena belum adanya Lapas yang dibangun dalam setiap Kabupaten/Kota.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Rumah Tahanan Negara di sebut dengan petugas Rutan, atau lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pemasyarakatan. Dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.¹

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjara yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi

¹ <http://rutannganjuk.blogspot.co.id/2014/09/perbedaan-rutan-dan-lapas> lembaga.
html?m=1. Senin 15 September 2014.

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana dan Anak Pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas penganyaman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga

Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Sama halnya dengan daerah-daerah yang terbesar di Indonesia, Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Gowa yang memiliki Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan berdomisili di Jalan Lembaga Bollangi, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

Adapun visi dan misi Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, yaitu:²

Visi:

- Terwujudnya insan Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang Bebas HIV/AIDS dan Narkoba

Misi:

- Melaksanakan perawatan kesehatan
- Melaksanakan bimbingan rohani dan hukum
- Melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi sosial
- Membangun kemitraan

B. Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Seperti yang sudah di bahas pada bagian sebelumnya, menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemenuhan hak pengurangan masa pidana ini, dapat dilihat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174

² Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Tahun 1999 Tentang Remisi, dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, dan remisi dasawarsa:³

- Remisi Umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
- Remisi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, (Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak) dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya satu kali dalam setahun bagi masing-masing agama, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliahkan oleh penganut agama yang bersangkutan.
- Remisi Tambahan, yaitu remisi yang diberikan kepada pidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau melakukan kegiatan yang membantu lempaga masyarakatan.
- Remisi Dasa Warsa, yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dalam waktu satu kali 10 tahun HUT RI. Remisi dasa warsa pertama kali diatur dalam keputusan presiden Republik Indonesia No. 120 Tahun 1955 tentang pengurangan hukuman istimewa hari Dwi Dasa Warsa Proklamasi Kemerdekaan RI.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ian Eka Junianto, Selaku Kasubsi Registrasi Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa,

³ Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, h.76-78

beliau menyatakan bahwa tolak ukur syarat dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkoba dapat dilihat pada PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang remisi.⁴

Pelaksanaan remisi terdiri atas ;

1. Remisi umum

- Syarat
 - a. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas
 - b. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda
 - c. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati/seumur hidup
 - d. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan
 - e. Tidak dikenakan hukuman disiplin
- Besarnya
 - a. 1 bulan bagi narapidana/anak pidana menjalani 6-12 bulan
 - b. 2 bulan bagi narapidana/anak pidana menjalani 12 bulan/lebih
 - c. Tahun ke 2 diberi remisi 3 bulan

⁴ Ian Eka Junianto, Kasubi Registrasi, Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa, Tanggal 2 Mei 2017.

- d. Tahun ke 3 diberi remisi 4 bulan
- e. Tahun ke 4 dan 5 diberi remisi 5 bulan
- f. Tahun ke 6 dan seterusnya diberi remisi 6 bulan

2. Remisi khusus

- Syarat
 - a. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas
 - b. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda
 - c. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati/seumur hidup
 - d. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan
 - e. Tidak dikenakan hukuman disiplin
- Besarnya
 - a. 15 hari bagi narapidana/anak pidana menjalani 6-12 bulan
 - b. 1 bulan bagi narapidana/anak pidana menjalani 12 bulan/lebih
 - c. Tahun ke 2 dan 3 diberi remisi 1 bulan
 - d. Tahun ke 4 dan 5 diberi remisi 1 bulan 15 hari
 - e. Tahun ke 6 dan seterusnya diberi remisi 2 bulan

3. Remisi tambahan

- Syarat
 - a. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas

- b. Warga Binaan Pemasyarakatan berjasa kepada Negara
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan melakukan perbuatan yang bermamfaat bagi kemanusiaan
- d. Warga Binaan Pemasyarakatan pembantu kegiatan pembinaan pemuka
- e. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan
- Besarnya
 - a. $\frac{1}{2}$ dari remisi umum bagi yang berjasa bagi Negara dan perbuatan yang bermamfaat
 - b. $\frac{1}{3}$ dari remisi umum tiap tahun yang membantu kegiatan pembinaan sebagai pemuka
- 4. Remisi dasa warsa
 - Syarat
 - a. Dipidana lebih dari 6 bulan
 - b. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati/seumur hidup
 - c. Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak pernah melarikan diri
 - Besarnya
 - a. $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan

Dalam hal menentukan bahwa yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sudah berkelakuan baik atau tidak, itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah ditentukan oleh masing-masing Lembaga Pemasyarakatan selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya.

Selanjutnya bahwa indikator yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapidana agar dapat memperoleh remisi adalah apabila narapidana tersebut selama menjalani masa pidana menunjukkan kesadaran dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin. Jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran dan terdaftar dalam buku registrasi (F) maka narapidana tersebut tidak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sesuai ketentuan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang berlaku.⁵

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, berdasarkan pertanyaan wawancara tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, beliau mengemukakan bahwa:⁶

Adapun syarat pemberian remisi bagi narapidana narkoba yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun masa pidana sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 34 ayat 2 dan 3 PP No. 99 Tahun 2012 yaitu:

1. Berkelakuan baik; dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi; dan

⁵ Ian Eka Junianto, Kasubsi Registrasi, di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Selasa 2 Mei 2017.

⁶ Ian Eka Junianto, Kasubsi Registrasi, di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Selasa 2 Mei 2017.

- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
- 2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan; dan

Adapula syarat pemberian remisi bagi narapidana narkoba yang dipidana dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun masa pidana yang putusannya terhitung sejak tahun 2013, selain harus memenuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 34 di atas, narapidana juga harus memenuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 34A ayat 1,2 dan 3 PP No. 99 Tahun 2012.

“Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keagamaan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan pidana korupsi; dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar;

1. Kesetian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia;
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun prosedur usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut, telah mendapatkan bentuk-bentuk pemberian pengurangan masa pidana (remisi) dan data mengenai

jumlah narapidana yang mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) pada tahun 2014-2016, kemudian di jelaskan oleh Bapak Angga Satria selaku Staf Registrasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, yaitu:⁷

Tabel 1

Bentuk-Bentuk Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Mulai Dari Tahap Pertama sampai seterusnya

Tahun Ke	Besarnya Remisi Umum	Besarnya Remisi Khusus	Besarnya Remisi Tambahan	Besarnya Remisi Dasawarsa
I Tahun Pertama (Apbila telah menjalani 6-12 bulan)	1 (satu) bulan	15 (lima belas) hari	$\frac{1}{2}$ Dari remisi umum	$\frac{1}{12}$ Dari masa pidana maksimal 3 bulan
I Tahun Pertama (Apabila telah lebih dari satu tahun)	2 (dua) bulan	1 (satu) bulan		
II Tahun Kedua	3 (tiga) bulan	1 (satu) bulan	$\frac{1}{3}$ Dari remisi umum dan seterusnya	
III Tahun Ketiga	4 (empat) bulan	1 (satu) bulan		
IV Tahun keempat	5 (lima) bulan	1 (satu) Bulan, 15 (lima belas) hari		
V Tahun Kelima	5 (lima) bula	1 (satu) Bulan, 15 (lima belas) hari		
VI Tahun Keenam dan Seterusnya	6 (enam) bulan	2 (dua) bulan		

Sumber : Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Berdasarkan uraian tabel tersebut, dapat menjelaskan bentuk-bentuk pemberian pengurangan masa pidana (remisi) mulai dari tahap pertama sampai seterusnya;

⁷ Angga Satria, Staf Registrasi, di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Tanggal 18 April 2017.

- 1 tahun pertama apabila telah menjalani masa pidana selama 6-12 bulan, mendapatkan remisi umum 1 bulan, remisi khusus 15 hari, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.
- 1 tahun pertama apabila telah lebih dari satu tahun menjalani masa pidana, mendapatkan remisi umum 2 bulan, remisi khusus 1 bulan, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.
- Tahun kedua mendapatkan remisi umum 3 bulan, remisi khusus 1 bulan, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum dan seterusnya, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.
- Tahun ketiga mendapatkan remisi umum 4 bulan, remisi khusus 1 bulan, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum dan seterusnya, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.
- Tahun keempat mendapatkan remisi umum 5 bulan, remisi khusus 1 bulan 15 hari, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum dan seterusnya, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.
- Tahun kelima mendapatkan remisi umum 5 bulan, remisi khusus 1 bulan 15 hari, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum dan seterusnya, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.
- Tahun keenam dan seterusnya mendapatkan remisi umum 6 bulan, remisi khusus 2 bulan, remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum dan seterusnya, dan remisi dasawarsa $\frac{1}{12}$ dari masa pidana maksimal 3 bulan.

Tabel 2

Jumlah Narapidana yang mendapatkan Remisi Khususnya Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa pada Tahun 2014

No	Jumlah Narapidana	Remisi Umum	Remisi Khusus	Remisi Tambahan	Remisi Dasawarsa
1	487 Orang	RU I (240 Orang)	—	—	—
		RU II (7 Orang)	—	—	—
2	465 Orang	—	RK I • Islam (243 Orang) • Kristen (5 Orang) • Hindu (-) • Budha (2 Orng)	—	—
		—	RK II • Islam (6 Orang) • Kristen (1 Orang) • Hindu (-) • Budha (-)	—	—
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
Jumlah		247 Orang	257 Orang	-	-
Jumlah Keseluruhan		504 Orang			

Sumber : Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Berdasarkan uraian tabel tersebut dapat menjelaskan jumlah narapidana yang ada di dalam Lapas baik yang mendapat remisi maupun tidak pada tahun 2014.

- Pada saat waktu pemberian remisi umum di tahun 2014, jumlah narapidana yang ada sebanyak (487 orang), yang mendapat RU I (240 orang), RU II (7 orang), dan selebihnya tidak mendapat remisi umum.
- Pada saat waktu pemberian remisi khusus di tahun 2014, jumlah narapidana yang ada sebanyak (465 orang), yang mendapat RK I; Islam (243 orang), Kristen (5 orang), Hindu (-), Budha (-). RK II; Islam (6 orang), Kristen (1 orang), Hindu (-), Budha (-), selebihnya tidak mendapat remisi khusus.
- Pada saat waktu pemberian remisi tambahan pada tahun 2014 tidak ada
- Pada saat waktu pemberian remisi dasawarsa pada tahun 2014 tidak ada

Jumlah yang mendapat remisi umum (247 orang), remisi khusus (257 orang), remisi tambahan (-), remisi dasawarsa (-), dan jumlah keseluruhan yang mendapatkan remisi pada tahun 2014 (504 orang).

Tabel 3

Jumlah Narapidana yang mendapatkan Remisi Khususnya Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa pada Tahun 2015

No	Jumlah Narapidana	Remisi Umum	Remisi Khusus	Remisi Tambahan	Remisi Dasawarsa
1	568 Orang	RU I (210 Orang)	—	—	—
		RU II (10 Orang)	—	—	—
2	546 Orang	—	RK I • Islam (243 Orang) • Kristen (8 Orang) • Hindu (6 Orang) • Budha (2 Orang)	—	—
		—	RK II • Islam (3 Orang) • Kristen (3 Orang) • Hindu (2 Orang) • Budha (-)	—	—
3	—	—	—	—	—
4	568 Orang	—	—	—	185 Orang
Jumlah		220 Orang	267 Orang	—	185 Orang
Jumlah Keseluruhan		672 Orang			

Sumber : Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Berdasarkan uraian tabel tersebut dapat menjelaskan jumlah narapidana yang ada di dalam Lapas baik yang mendapat remisi maupun tidak pada tahun 2015.

- Pada saat waktu pemberian remisi umum di tahun 2015, jumlah narapidana yang ada sebanyak (568 orang), yang mendapat RU I (210 orang), RU II (10 orang), dan selebihnya tidak mendapat remisi umum.

- Pada saat waktu pemberian remisi khusus di tahun 2015, jumlah narapidana yang ada sebanyak (546 orang), yang mendapat RK I; Islam (243 orang), Kristen (8 orang), Hindu (6 orang), Budha (2 orang). RK II; Islam (3 orang), Kristen (3 orang), Hindu (2 orang), Budha (-), selebihnya tidak mendapat remisi khusus.
- Pada saat waktu pemberian remisi tambahan pada tahun 2015 tidak ada
- Pada saat waktu pemberian remisi dasawarsa pada tahun 2015, jumlah narapidana yang ada sebanyak (586 orang), yang mendapat remisi (185 orang), selebihnya tidak mendapat remisi.

Jumlah yang mendapat remisi umum (220 orang), remisi khusus (267 orang), remisi tambahan (-), remisi dasawarsa (185 orang), dan jumlah keseluruhan yang mendapatkan remisi pada tahun 2015 (672 orang).

Tabel 4

Jumlah Narapidana yang mendapatkan Remisi Khususnya Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa pada Tahun 2016

No	Jumlah Narapidana	Remisi Umum	Remisi Khusus	Remisi Tambahan	Remisi Dasawarsa
1	786 Orang	RU I (349 Orang)	—	—	—
		RU II (42 Orang)	—	—	—
2	743 Orang	—	RK I <ul style="list-style-type: none"> • Islam (336 Orang) • Kristen (10 Orang) • Hindu (4 Orang) • Budha (-) 	—	—
		—	RK II <ul style="list-style-type: none"> • Islam (45 Orang) • Kristen (1 Orang) • Hindu (-) • Budha 	—	—
3	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-
Jumlah		391 Orang	396 Orang	-	-
Jumlah Keseluruhan		787 Orang			

Sumber : Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Berdasarkan tabel tersebut dapat menjelaskan jumlah narapidana yang ada di dalam Lapas baik yang mendapat remisi maupun tidak pada tahun 2016.

- Pada saat waktu pemberian remisi umum di tahun 2016, jumlah narapidana yang ada sebanyak (786 orang), yang mendapat RU I (349 orang), RU II (42 orang), dan selebihnya tidak mendapat remisi umum.
 - Pada saat waktu pemberian remisi khusus di tahun 2016, jumlah narapidana yang ada sebanyak (743 orang), yang mendapat RK I; Islam (336 orang), Kristen (10 orang), Hindu (4 orang), Budha (-). RK II; Islam (45 orang), Kristen (1 orang), Hindu (-), Budha (-), selebihnya tidak mendapat remisi khusus.
 - Pada saat waktu pemberian remisi tambahan pada tahun 2016 tidak ada
 - Pada saat waktu pemberian remisi dasawarsa pada tahun 2016 tidak ada
- Jumlah yang mendapat remisi umum (391 orang), remisi khusus (396 orang), remisi tambahan (-), remisi dasawarsa (-), dan jumlah keseluruhan yang mendapatkan remisi pada tahun 2016 (787 orang).

Keterangan Tabel:

RU I :Narapidana mendapatkan remisi pada saat 17 agustus tapi masi menjalani sisa hukumannya

RU II : Narapidana bebas pada saat 17 Agustus

RK I :Narapidana mendapatkan remisi pada saat hari keagamaan tapi masih menjalani sisi hukumannya

RK II :Narapidana bebas pada saat hari keagamaan

RT :Narapidana mendapatkan remisi karena berjasa kepada Negara dan telah melakukan perbuatan yang bermamfaat bagi kemanusiaan/Pemuka

RD :Narapidana mendapatkan remisi satu kali dalam sepuluh tahun hari kemerdekaan Republik Indonesia

Berdasarkan data tabel 1 di atas dapat diketahui bentuk dan besarnya remisi yang di diberikan kepada narapidana mulai dari tahap pertama sampai seterusnya, kemudian data tabel 2, 3 dan 4, tentang jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada 2014-2016, dapat dilihat bahwa narapidana narkotika yang mendapatkan pemberian pengurangan masa pidana (remisi) setiap ada pemberian remisi, (Remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi dasawarsa) telah memenuhi syarat-syarat pemberian remisi tersebut, dan hanya $\frac{1}{2}$ (satu seperdua) dari semua jumlah narapidana yang ada. kemudian dapat pula dilihat jumlah narapidana yang ada dan yang mendapatkkan pemberian pengurangan masa pidana (remisi) di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa mulai dari tahun 2014-2016 semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, menyatakan bahwa telah mendapatkan haknya dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) berdasarkan PP No 99 Tahun 2012, contohnya sebagai berikut;⁸

- (1) Narapidana yang bernama Ronal Ropas, berusia 36 tahun, pekerjaan wirasuwasta, menjalani hukuman pidana selama 9 tahun, subsider selama 5 bulan kurungan, narapidana telah mengikuti kegiatan para Warga Binaan di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, seperti kegiatan; (a). Beribadah (sholat lima waktu secara berjamaah), (b). Kegiatan rutinitas

⁸ Narapidana Narkotika, di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Tanggal 3 Mei 2017.

(pengajian umum, kultum/belajar berdakwa, tadarus Al-Qur'an, syiar yasin keliling antar blok, barzanji/maulid diba', pembinaan mental), (c). Pendidikan (pengajian Iqro dan Al-Qur'an, ilmu tajwid, pelatihan sholat, pelatihan pemandian mayat), (d). Kebersihan masjid (membersihkan halaman masjid dan luar masjid, membersihkan sarana peribadatan seperti; karpet, sejadah dan mimbar, membersihkan tempat wudhu), (e). Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan Lembaga Pemasyarakatan (tahun baru islam, Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Isro' Mi'roj Nabi Besar Muhammad SAW, Nisfu Sya'ban, taraweh ramadhan, idul fitri, idul adha), (f). Narapidana tidak pernah melakukan tindak pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan, (berkelahi, mencuri, merusak fasilitas-fasilitas lembaga pemasyarakatan). Berdasarkan pernyataan narapidana tersebut, menyatakan bahwa telah mendapatkan haknya dalam pemberian pengurangan masa pidana, yaitu; Remisi umum 5 bulan, Remisi khusus 2 bulan, Remisi Dasawarsa 3 bulan, selama narapidana menjalani hukuman pidana 2 tahun.

- (2) Narapidana yang bernama Junaedi Aco, berusia 16 tahun, pekerjaan wirasuwasta, menjalani hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan, narapidana telah mengikuti kegiatan para Warga Binaan di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, seperti kegiatan; (a). Beribadah (sholat lima waktu secara berjamaah), (b). Kegiatan rutinitas (pengajian umum, kultum/belajar berdakwa, tadarus Al-Qur'an, syiar yasin keliling antar blok, barzanji/maulid diba', pembinaan mental), (c). Pendidikan (pengajian Iqro dan Al-Qur'an, ilmu tajwid, pelatihan sholat, pelatihan pemandian mayat), (d). Kebersihan

masjid (membersihkan halaman masjid dan luar masjid, membersihkan sarana peribadatan seperti; karpet, sejadah dan mimbar, mebersihkan tempat wudhu), (e). Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan Lembaga Pemasyarakatan (tahun baru islam, Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Isro' Mi'roj Nabi Besar Muhammad SAW, Nisfu Sya'ban, taraweh ramadhan, idul fitri, idul adha). (f). Narapidana tidak pernah melakukan tindak pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan, (berkelahi, mencuri, merusak fasilitas-fasilitas lembaga pemasyarakatan). Berdasarkan pernyataan narapidana tersebut, menyatakan bahwa telah mendapatkan haknya dalam pemberian pengurangan masa pidana, yaitu; Remisi umum 2 bulan, Remisi khusus 1 bulan, selama menjalani hukuman pidana 1 tahun.

- (3) Narapidana yang bernama Marwansyah, berusia 30 tahun, pekerjaan wirasuwasta, menjalani hukuman pidana selama 1 tahun 6 bulan, narapidana telah mengikuti kegiatan para Warga Binaan di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, seperti kegiatan; (a). Beribadah (sholat lima waktu secara berjamaah), (b). Kegiatan rutinitas (pengajian umum, kultum/belajar berdakwa, tadarus Al-Qur'an, syiar yasin keliling antar blok, barzanji/maulid diba', pembinaan mental), (c). Pendidikan (pengajian Iqro dan Al-Qur'an, ilmu tajwid, pelatihan sholat, pelatihan pemandian mayat), (d). Kebersihan masjid (membersihkan halaman masjid dan luar masjid, membersihkan sarana peribadatan seperti; karpet, sejadah dan mimbar, mebersihkan tempat wudhu), (e). Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan Lembaga Pemasyarakatan (tahun baru islam, Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Isro' Mi'roj Nabi Besar

Muhammad SAW, Nisfu Sya'ban, taraweh ramadhan, idul fitri, idul adha). (f). Narapidana tidak pernah melakukan tindak pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan, (berkelahi, mencuri, merusak fasilitas-fasilitas lembaga pemasyarakatan). Berdasarkan pernyataan narapidana tersebut, menyatakan bahwa telah mendapatkan haknya dalam pemberian pengurangan masa pidana, yaitu; Remisi umum 1 bulan, Remisi khusus 15 hari, selama menjalani hukuman pidana 7 bulan.

- (4) Narapidana yang bernama Simagga, berusia 36 tahun, pekerjaan petani, menjalani hukuman pidana selama 5 tahun, subsider 2 bulan kurungan, narapidana telah mengikuti kegiatan para Warga Binaan di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, seperti kegiatan; (a). Beribadah (sholat lima waktu secara berjamaah), (b). Kegiatan rutinitas (pengajian umum, kultum/belajar berdakwa, tadarus Al-Qur'an, syiar yasin keliling antar blok, barzanji/maulid diba', pembinaan mental), (c). Pendidikan (pengajian Iqro dan Al-Qur'an, ilmu tajwid, pelatihan sholat, pelatihan pemandian mayat), (d). Kebersihan masjid (membersihkan halaman masjid dan luar masjid, membersihkan sarana peribadatan seperti; karpet, sejadah dan mimbar, membersihkan tempat wudhu), (e). Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan Lembaga Pemasyarakatan (tahun baru islam, Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Isro' Mi'roj Nabi Besar Muhammad SAW, Nisfu Sya'ban, taraweh ramadhan, idul fitri, idul adha). (f). Narapidana tidak pernah melakukan tindak pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan, (berkelahi, mencuri, merusak fasilitas-fasilitas lembaga pemasyarakatan). Berdasarkan pernyataan

narapidana tersebut, menyatakan bahwa telah mengikuti semua kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan akan tetapi tidak mendapatkan haknya dalam pemberian pengurangan masa pidana karena telah melakukan pelanggaran dalam lembaga pemasyarakatan (berkelahi).

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara oleh beberapa narapidana narkoba, menyatakan bahwa remisi adalah suatu hal yang paling kami nantikan, remisi merupakan salah satu sarana motivasi untuk membina diri kami agar dapat mengurangi masa pidana yang di jalani dan kembali secepatnya berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab dalam kehidupan bangsa dan Negara. Apabila narapidana telah mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan akan tetapi narapidana telah melakukan pelanggaran (berkelahi), maka itu dapat menjadi kendala bagi narapidana, tidak berhak mendapatkan remisi karena telah melakukan pelanggaran, kecuali jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 34 dan 34A PP No. 99 Tahun 2012.

Dalam kesempatan yang sama, telah melakukan wawancara dengan Bapak H. Ambo Asse selaku Kasi Binapi di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa mengenai pendapatnya terkait pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkoba, beliau menyatakan bahwa pemberian pengurangan masa pidana (Remisi) bagi narapidana narkoba saat ini sudah semakin ketat sejak diberlakukannya aturan baru yaitu PP No. 99 Tahun 2012 perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006, dalam aturan baru ini berlaku bagi narapidana narkoba yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus memenuhi syarat

yang terdapat dalam Pasal 34 PP No. 99 Tahun 2012 dan bagi narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun harus memenuhi syarat tambahan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sesuai yang terkandung dalam Pasal 34A, PP No. 99 Tahun 2012, Persyaratan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut berlaku sejak 12 November Tahun 2012. Salah satu ketentuan dalam persyaratan tersebut yaitu: Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, selanjutnya dijelaskan pula pada ayat (3) yaitu harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh Instansi penegak hukum sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.⁹

Dalam kesempatan yang sama, dapat dipertanyakan pula mengenai pelaksanaan pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa, beliau menyatakan bahwa pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, jadi semua dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa sudah sesuai dengan

⁹ Ambo Asse, Kasi Binapi, di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa, Tanggal 2 Mei 2017.

¹⁰ Ambo Asse, Kasi Binapi, di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa, Tanggal 2 Mei 2017.

peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan tentang pemberian pengurangan masa pidana (remisi) kepada narapidana tindak pidana narkotika sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan.

C. Hal-hal Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Menurut Bapak Victor Teguh Prihartono, Selaku Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, mengemukakan bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkotika dapat dilihat dari syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana. Syarat-syarat dan ketentuan telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan Pasal 14 poin 1, Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi dan PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan Dalam Pasal 1 angka 1,2 dan 3 peraturan tersebut.¹¹

Dijelaskan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi

¹¹ Victor Teguh Prihartono, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Tanggal 3 Mei 2017.

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi Syarat :

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemeberian remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34A

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keagamaan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memnuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan pidana korupsi; dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar;
 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia;
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1)
- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Berusia diatas 70 (tuju puluh) tahun; atau
 - c. Menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.”

Dengan diberikannya hak pengurangan masa pidana kepada narapidana tindak pidana narkoba, dengan dasar yang bersangkutan telah berkelakuan baik, maka itu dapat dianggap sebagai faktor yang melemahkan upaya penegakan hukum di Indonesia, terkhusus dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Dasar kealakuan baik, itu tidak bisa diterapkan khusus bagi narapidana tindak pidana narkoba, hal ini dikarenakan hampir semua narapidana tindak pidana narkoba akan senantiasa berkelakuan baik dalam masa pidana. Berbeda halnya dengan narapidana tindak pidana pembunuhan, atau pemukulan misalnya. Dalam hal narapidana ini, dasar berkelakuan baik dapat dijadikan sebagai indikator untuk memberikan remisi.

Untuk melihat apakah seorang narapidana tindak pidana narkoba itu dapat mengubah diri atau masih sama dengan sebelum dipidana, tidaklah cukup dengan perbuatan baik saja. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkoba ini, terkait masalah psikologis, bukan masalah perilaku menjalani pidana pada lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkoba sudah cukup efektif dengan adanya aturan baru yaitu PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan, pemberian remisi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, para terpidana yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun tidak akan mudah mendapatkan remisi karena adanya tambahan persyaratan yang tertuan dalam syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Disamping efektif, ada juga

yang menjadi kelemahan dari aturan tersebut karena adanya perbedaan antara pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana penjara 5 (lima) tahun keatas dan Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun kebawah, dengan adanya perbedaan tersebut maka dapat dilihat bahwa ada perbedaan yang signifikan atas narapidana yang dipenjara dalam kurang waktu yang cukup lama 5 (lima) tahun keatas, dengan narapidana yang pidana dalam waktu singkat 5 (lima) tahun kebawah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkoba yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas II Sungguminasa, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sesuai dengan data dan penjelasan yang diberikan, pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkoba sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan.
2. Pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada, seperti hal pertimbangan indikator berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Sesuai yang terkandung dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1,2 dan 3 peraturan tersebut. Hal ini lebih ditekankan bagi narapidana narkoba yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas terhadap pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkoba yang dilakukan di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa, maka dapat meranyarangkan agar:

1. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana , aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatkannya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana itu sendiri melanikan terhadap berkurangnya tindak pidana narkoba dan tindak pidana tertentu lainnya.
2. Pemberian penurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkoba sebaiknya lebih diperketak lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, hal ini diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga harus memberikan dampak rasa takut kepada masyarakat umum khususnya generasi muda. Sehingga perkara tindak pidana narkoba di Negara ini dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdullah Wahidah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar: Perpustakaan FH-Unair, 1999.
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika Dan Peraturan Lainnya*, Direktorat Hukum: Deputi Bidang Dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, 2016
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dahlan M.Y, Al-Barry et.al, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelekrual*, Surabaya: Target Press, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bogor: 2007.
- Effendy Rusli, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Makassar: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), 1986.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Kudzaifah Dimiyati & Wardiono kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- Kelsen Hans, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006.
- Lisa Juliana FR– Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan kesehatan dan hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marbun Rocky, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

Marpuang Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1992.

Priyanto Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Ramdlon Naning, *HAM Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983.

Syamsuddin Rahman & Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra wacana media, 2014.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pres, 1984.

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Ubaedillah A & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.

Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sumber Internet :

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak.html?m=1>, 24 November 2014.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f66ff3bd89c5/soal-remisi-dasawarsa>, Tanggal 20 Agustus 2015

<http://rutannganjuk.blogspot.co.id/2014/09/perbedaan-rutan-dan-lapas-lembaga--html?m=1> Senin 15 September 2014.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No.M.09.HN 02.10 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI

PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sumber Penelitian

Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Junianto Ian Eka, Kasubsi Registrasi, Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Tanggal 2 Mei 2017.

Satria Angga, Staf Registrasi, di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Tanggal 18 April 2017

Narapidana Narkotika, di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Tanggal 3 Mei 2017.

Asse Ambo, Kasi Binapi, di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Tanggal 2 Mei 2017.

Prihartono Victor Teguh, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Tanggal 3 Mei 2017



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PEMBERIAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA)”, yang disusun oleh Muh. Takbir, Nim: 10500113076, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2017 M, bertepatan dengan bulan Ramadhan 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, (dengan beberapa perbaikan).

Gowa 10 Juli 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H. (.....)
Munaqisy I	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum. (.....)
Munaqisy II	: Dr. Fadli A. Natsif, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing II	: Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H. (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Hal : Permohonan Judul Skripsi.

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa.

Assalamu Alaikum Wa. Wa.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Takbir

Nim : 10500113076

Semester/Klupk : 7 (tuju) /B

Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana peredaran narkotika di hubungkan dengan undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Tinjauan yuridis terhadap pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkotika (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan / lapas dikabupaten gowa) (Studi kasus di lapas Narko Kts 2A Sunggum).
3. Analisis yuridis kasus pembunuhan berencana (studi kasus Putusan Pengadilan negeri).

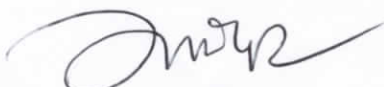
Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih.,

Wassalamu Alaikum Wa. Wa.

Samata 6 oktober 2016

Mengetahui,

Penasehat Akademik


(Dr. Jumadi, SH. M.H.)

13/10/16



Muh Takbir

Pemohon


(Muh Takbir)

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI / MASALAH	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI SEKERTARIS JURUSAN
<p>RUMUSAN MASALAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pengedar narkoba ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap pengedar narkoba ? <p>JUDUL SKRIPSI</p> <p>Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana peredaran narkoba di hubungkan dengan undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.</p>		
<p>RUMUSAN MASALAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di kabupaten gowa? <i>di lapas narkoba kelas 2A Sungguminaha</i> 2. Bagaimanakah / pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di kabupaten gowa? <i>di lapas narkoba kelas 2A Sungguminaha</i> 	<p><i>13/10/16</i></p>	<p><i>[Signature]</i> <i>Rahmat Yana-din</i></p>

JUDUL SKRIPSI <p><i>Pemberian</i> Tinjauan yuridis terhadap pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana narkotika (Studi kasus di <i>lapas karisofta K/S 2R Sungguminirga</i> Bembaga Pemasyarakatan / lapas dikabupaten gowa)</p>		
RUMUSAN MASALAH <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan berencana ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan berencana ? 3. JUDUL SKRIPSI Analisi yuridis kasus pembunuhan berencana (studi kasus Putusan Pengadilan negeri) 		
PEMBIMBING UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALA UDDIN M A K A S S A R	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI KETUA JURUSAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 		

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : Tahun 2017

TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI

TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Jumadi, SH.,MH
2. Ashabul Kahfi, S.Ag.,MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Muh. Takbir

N I M : 10500113076

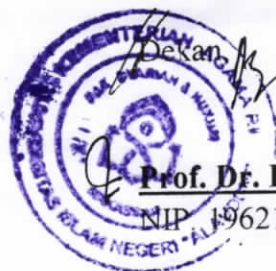
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa"

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017
d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 20 Maret 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : 1381/SI.3A/PP.00.9/ 03/2017
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

An. Muh. Takbir /10500113076

Kepada Yth;

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. DR. Jumadi, SH.,MH. | Sebagai Pembimbing I. |
| 2. Ashabul Kahfi., S.H ,MH. | Sebagai Pembimbing II. |
| Di- | |


Samata

Bersama ini kami mengundang bapak/ibu/saudara, untuk menghadiri **Seminar** dan melaksanakan serta bertindak selaku **Pembimbing** pada **Seminar Draft Skripsi**, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Maret 2017
Waktu : 10:00 WITA - selesai
Tempat/Ruangan : Ruang 107 Fakultas Syariah Dan Hukum
Judul Skripsi : **Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi)**
Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas
Narkotika Kelas IIA Sungguminasa)

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Samata, 22 Maret 2017

M A K A S S A R

Kasasala,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Intizamah, SH.,MH.
NIP. 19680120 199503 2 001

Catatan :

- SK Pembimbing Draft Skripsi terlampir
- Pembimbing diharapkan hadir

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

**PEMBERIAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) BAGI NARAPIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA
SUNGGUMINASA)**

Disusun dan diajukan Oleh :

Muh. Takbir

NIM: 10500113076

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan
penulisan skripsi
Pada tanggal : 13 April 2017

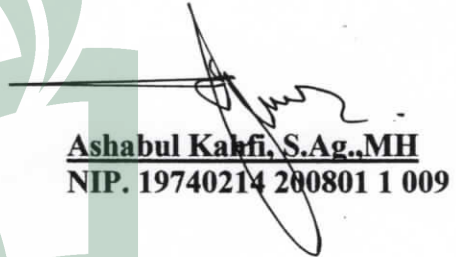
DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I



Dr. Jumadi, SH., MH
NIP. 19630204 199403 1 003

Pembimbing II




Ashabul Kahfi, S.Ag., MH
NIP. 19740214 200801 1 009

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Istiqamah, SH. MH
NIP. 196801120 199503 2 001
M A K A S S A R

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar




Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

**PEMBERIAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) BAGI
NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA
KELAS IIA SUNGGUMINASA)**



Proposal Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Dan ts 20/4/2017

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MUHL. TAKBIR

NIM: 100500113076

**ALAUDDIN
MAKASSAR**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

Acc. 21/3-2017
4/ Regra Ujian Prasyarat

[Signature]

20 MAR 2017

DRAFT SKRIPSI

NAMA : MUH. TAKBIR

NIM : 10500113076

FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM / PRODI ILMU HUKUM

**JUDUL : PEMBERIAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)
BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA).**

Pembimbing

1. Dr. Sumadi SH. MH.
2. Ashabul Kahfiy SH. MH.

RAHMAN SYAMSUDDIN, SH. MH.

NIP. 19821207 200901 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba ataupun napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya.

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Nomor : 1685 SI.1/PP.00.9/04/2017
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 13 April 2017

Kepada
Yth. **Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan**
Cq. Kepala UPT P2T BKPM Pro. Sul-Sel

Di-Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Muh. Takbir
N I M : 10500113076
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pallangga, Kab. Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

"Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa)"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dengan dosen pembimbing:

1. Dr. Jumadi, SH.,MH
2. Ashabul Kahfi, SH.,MH

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa terhitung mulai tanggal 17 April 2017 – 17 Mei 2017.

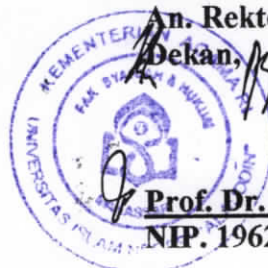
Demikian harapan kami dan terimakasih.

Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.

Wassalam

An. Rektor

Dekan,



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 5 1 4 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5019/S.01P/P2T/04/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Prov. Sulsel

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : 1625/SI.1/PP.00.9/04/2017 tanggal 13 April 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH. TAKBIR**
Nomor Pokok : 10500113076
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" PEMBERIAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 April s/d 17 Mei 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 17 April 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002



Nomor : W.23.UM.01.01- (b)
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

21 April 2017

**Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa
di - Sungguminasa**

Berkenaan dengan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5019/S.01P/P2T/04/2017 tanggal 17 April 2017 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : **MUH. TAKBIR**
Nomor Pokok : 10500113076
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (D3)
Alamat : Jln. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa untuk menyusun **Karya Tulis Ilmiah** dengan judul "**PEMBERIAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA)**", yang dilaksanakan mulai tanggal 25 April 2017 s/d 25 Mei 2017, sehubungan dengan hal tersebut, kiranya yang bersangkutan dapat diberikan data dan informasi dalam rangka penelitian dengan ketentuan harus mentaati segala ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimah kasih

ALA UDDIN
M A K A S S A R



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Divisi Administrasi pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar (Sebagai Laporan)
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar
4. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar
5. Pertinggal.



SURAT KETERANGAN

Nomor : W23.PAS.E35- 91 UM.01.01 TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : VICTOR TEGUH PRIHARTONO, Bc.I.P, S.Sos, M.H
N I P : 19670401 199003 1 001
Pangkat / Gol : Pembina / (IV/a)
Jabatan : Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa
Unit Kerja : Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa

Menerangkan dengan Sesungguhnya Bahwa :

N a m a : MUH. TAKBIR
N I M : 10500113076
Asal Perg. Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Benar telah melakukan kegiatan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan judul **"PEMBERIAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA)"** yang dilaksanakan dari tanggal 25 April 2017 s.d. 25 Mei 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 27 Mei 2017



**Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
& Kelas IIA Sungguminasa**

**Victor Teguh Prihartono, Bc.Ip., S.Sos., MH.
NIP. 19670401 199003 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 0411-864924, Fax. 864923, Makassar 90221
Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Telp. 0411-841879 Fax. 8221400 Samata-Gowa 92113

M E M O

MUH.

TACDIR

LULUS MENGAJI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SAMATA - 21-4-2017

Sy. aeban
Syah Chotban

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor: 438 Tahun 2017

**T E N T A N G
PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 25 April 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kedua : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Ketiga : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Keempat : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keenam : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
pada tanggal : 25 April 2017
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 428/TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI				PELAKSANA KETUA/SEK/ANG.
		MKD/FIKIH & USUL FIKIH	MKD/DIS	MKKP		
01	02	03	04	05	06	
1	Ilham Suyuti Ikhsan 10500113124	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	Dr. Muh. Sabir, M.Ag	Ahkam Jayadi, S.H, M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid	
2	Muh. Takbir 10500113076	Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I	Prof. Dr. Hj. St. Aisyah Kara, M.A	Dr. Jumadi, M.H	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid	



Samata, 21 April 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muh Takbir**, Nim: 10500113076, Mahasiswa Jurusan **Ilmu Hukum** pada **Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul **"Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

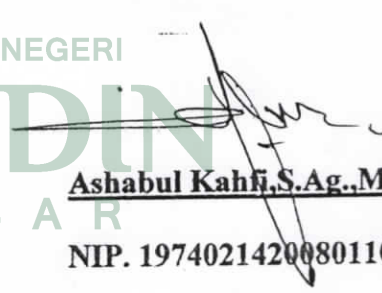
Makassar, 19 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jamadi, SH.,MH

Nip. 19630204 199403


Ashabul Kahfi, S.Ag.,MH

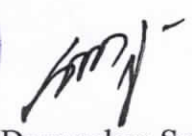
NIP. 197402142008011009

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 270 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Muh Takbir
N I M : 10500113076
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Pemberian Pengurangan Masa Pidana (remisi) Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas II.A Sungguminasa)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H, M.H
Penguji I : Dr. Marilang, S.H, M.H
Penguji : Dr. Fadli A. Natsif, M.H
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 24 Mei 2017
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembususan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

Nomor : 270 /SI.1/PP.00.9/ .. /2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 24 Mei 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)
 - 3 Dr. Marilang, S.H., M.H (Penguji I)
 4. Dr. Fadli A. Natsif, M.H (Penguji II)
 - 5 Dr. Junaedi, S.H., M.H (Pembimbing I)
 6. Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Muh Takbir
N I M : 10500113076
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2017
Waktu : Pukul 09.00-10.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Wassalam

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji dan pembimbing penulisan skripsi saudara **MUH TAKBIR NIM: 10500113076** Mahasiswa Jurusan ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul, "PEMBERIAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Dengan demikian ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 5 juni 2017

Penguji I

Dr. Marilang, S.H., M.H.

Nip. 19621231 199303 1 024

Pembimbing I

Dr. Jumadi, S.H., M.H.

Nip. 19630204 199043 1 003

Penguji II

Dr. Fadli A. Natsif, M.H.

Nip. 19661016 201411 1 001

Pembimbing II

Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H.

Nip. 19740214 200801 1 009

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor 726 Tahun 2017

T E N T A N G

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
 : N a m a : Muh. Takbir
 : N I M : 10500113076
 : Jurusan : Ilmu Hukum
 : Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
 : Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
 : Judul : "Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Marilang, S.H., M.Hum.
Penguji II : Dr. Fadli Andi Natsif, M.H.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
 2. Nurhayati Wahid

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



: Samata
: 12 Juni 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembususan

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa;

Nomor : 2016./SI.1/PP.00.9/ 6. /2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 12 Juni 2017

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqamah, S.H., M.H. (Sekertaris)
3. Dr. Marilang, M.Hum. (Penguji I)
4. Dr. Fadli Andi Natsif, M.H. (Penguji II)
5. Dr. Jumadi, S.H., M.H. (Pembimbing I)
6. Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Ala ikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Muh. Takbir
N I M : 10500113076
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan,
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

RIWAYAT HIDUP



Skripsi ini berjudul “Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Penulis skripsi ini atas nama **Muh Takbir** biasa dipanggil **Takbir**, lahir di Makassar 28 Februari 1995, anak bungsu dari dua bersaudara atau adik kandung seorang perempuan yang bernama Hasmirawati, dari pasangan suami istri Bapak Sainuddin Dg Mangung dan Ibu Normawati Dg Tommi, dan penulis skripsi ini tinggal di Dusun Borong Jambu Desa Julu pa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Pendidikan yang telah di tempuh oleh penulis skripsi yaitu; SD Inpres Watu-Watu di Desa Julu Pa'mai Kec Pallangga Kab Gowa Lulus pada tahun 2006, SMP Negeri 2 Bajeng di Desa Paraikatte Kec Bajeng Kab Gowa Lulus pada tahun 2009, SMK Negeri 1 Pallangga di Jln. Baso Dg. Ngawing N0.127, Kel Mangalli Kec Pallangga Kab Gowa Lulus pada tahun 2012, dan mulai tahun 2013 mengikuti Progran S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana dan lulus mengikuti ujian Munaqasa dan Yudisium pada tanggal 15 Juni 2017 dengan lama kuliah dalam waktu tiga tahun sembilan bulan Sembilan hari.

Semasa kuliah penulis skripsi aktif di organisasi ILS (Independent Law Studen) pada tahun 2014/2015, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) komisyariat Fakultas

Syari'ah dan Hukum sebagai kordinator Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi pada tahun 2016/2017, HIPMA Gowa Kordinatorat Pallangga sebagai Wakil Sekretaris pada tahun 2015/2016, DPW POSPERA SulSel (Posko Perjuangan Rakyat) sebagai kordinator Bidang Pemuda dan Olahraga.

